

# **GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS ON THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS AND THEIR IMPLICATIONS FOR PERFORMANCE ACCOUNTABILITY.**

## **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA**

**Nugraeni**

**M. Budiantara**

Email: [nda\\_eni@yahoo.com](mailto:nda_eni@yahoo.com)

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Jalan Wates km 10 Yogyakarta

### **ABSTRACT**

This study aims to obtain empirical evidence, the effect of the application of government accounting standards on the quality of financial statements and their implications for performance accountability. This research conducted on Yogyakarta city government officials on education. There are three variables used in this research that government accounting standards, financial reporting quality and performance accountability. Analysis of the data used is the program Statistical Package for Social Science (SPSS) version of 19. Hypothesis testing is used path analysis. The result variable application of government accounting standards affect the quality of the financial statements, but does not directly influence the performance accountability. Medium quality financial statements directly affect the performance accountability. The new structure is formed from path analysis supported by empirical evidence.

Keywords: Government Accounting Standards, Financial Reporting Quality, Performance Accountability

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris, efek dari penerapan standar akuntansi pemerintah pada kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap akuntabilitas kinerja.. Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta pejabat pemerintah kota pendidikan. Ada tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu standar akuntansi pemerintah, kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas kinerja. Analisis data yang digunakan adalah program statistik Paket untuk Ilmu Sosial (SPSS) versi 19. Hipotesis pengujian digunakan analisis jalur. Hasil penerapan variabel standar akuntansi pemerintah mempengaruhi kualitas laporan keuangan, tetapi tidak secara langsung mempengaruhi akuntabilitas kinerja. Laporan keuangan yang berkualitas menengah secara langsung mempengaruhi akuntabilitas kinerja. Struktur baru terbentuk dari analisis jalur didukung oleh bukti empiris..

Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Pelaporan Keuangan, Akuntabilitas Kinerja

---

## PENDAHULUAN

---

Pemerintah yang baik atau *good governance* merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintah harus dapat mengelola sumberdaya yang ada dinegara, salah satunya yang terpenting adalah keuangan.

Mardiasmo (2004:12) mengatakan, instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan pelaporan keuangan yang tepat, jelas dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu diperlukan upaya reformasi dan pengembangan, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan, yang berkesinambungan sehingga terbentuk suatu sistem yang tepat. Dengan adanya laporan keuangan baik keuangan pusat maupun daerah diharapkan dapat dikelola dengan baik dalam rangka mengelola dana publik secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala SKPD selaku pengguna anggaran diharuskan menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas yang berada dalam tanggungjawabnya. Pencatatan atas transaksi tersebut sebagai bahan dalam menyiapkan laporan keuangan SKPD.

Sesuai dengan amanat undang-undang no 17 tahun 2003 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

“SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemenya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah” Deddi Nordiawan (2006:25),. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai PP No. 24 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 71 tahun 2010, terdapat hubungan terkait antara SAP dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Purwaniati Nugraheni dan Imam Subaweh (2008) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan SAP terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan studi pada Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional. Kesimpulan yang sama juga diperoleh dalam penelitiannya Dianne Natalia Christanti (2012) pada Biro Keuangan Setda Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Arif Ardi Kusuma dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan SAP berpengaruh pada kualitas laporan keuangan SKPD kota Tasikmalaya, demikian juga penelitian Jannaeni.

Penerapan sistem keuangan pada prakteknya tidak terlepas dari persepsi, wawasan dan profesionalisme dari aparatur pemerintahannya itu sendiri. Hal ini berimplikasi terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh setiap satuan kerja pemerintah. Kualitas dari laporan keuangan tersebut belum mendapatkan opini yang wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Data hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2013 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan

terhadap ketentuan perundang-undangan. Saat ini perkembangan kualitas laporan keuangan serta akuntabilitas atas LKPD belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dari opini atas LKPD yang diberikan oleh BPK RI masih ada yang mendapatkan opini *disclaimer* atau tidak memberikan pendapat. Berikut ini perkembangan opini LKPD tahun 2008 – 2012.

Tabel 1 Perkembangan Opini LKPD tahun 2008 – 2012

LKPD Tahun	OPINI								JML
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	65%	48	10%	111	22%	504
2010	34	7%	341	66%	26	5%	115	22%	516
2011	67	13%	349	67%	8	1%	100	19%	524
2012	113	27%	267	64%	4	1%	31	8%	415

Hasil evaluasi atas SPI yang dilakukan oleh BPK RI menunjukkan kasus-kasus kelemahan yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan.
2. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.
3. Kelemahan struktur pengendalian intern.

Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pejabat/pelaksana yang bertanggungjawab tidak/belum melakukan pencatatan secara akurat dan tidak menaati ketentuan dan prosedur yang ada, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, belum menetapkan prosedur kegiatan, serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian.

“Secara teoritis penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun secara bersama-sama”, Urip Santoso dan Yohanes Joni Pambelum. Jannaeni (2012) menyimpulkan

bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Agus Dwiyanto, 2002). Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan di dalam rangka menilai akuntabilitas dan memenuhi keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. Sumiyati (2008) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Penerapan SAP berpengaruh terhadap Akuntabilitisa Kinerja pada SKPD Kabupaten Siak. Jannaeni (2012) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

## METODE PENELITIAN

### Pengumpulan data dan pengambilan sampel

Sampel penelitian ini terdiri dari pegawai bagian akuntansi di kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Yogyakarta. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuisisioner. Dari 75 kuisisioner yang dikirim, hanya 65 kuisisioner yang memenuhi syarat untuk diproses

## Definisi Operasional variabel

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dengan indikator: (1). Kerangka konseptual SAP, (2). Konsep penyajian laporan keuangan, (3). Konsep laporan realisasi anggaran, (4). Konsep akuntansi persediaan, (5). Konsep akuntansi aset tetap dan konstruksi dalam pengerjaan, (6). Konsep akuntansi kewajiban, (8). Konsep koreksi kesalahan atas laporan keuangan.

Kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu dari laporan keuangan sektor publik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Indikatornya adalah: (1). Komitmen, (2). Sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya-sumberdaya secara konsisten, (3). Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (4). Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, (5). Jujur obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan.

## Alat Analisis

### Koefisien Jalur

Persamaan jalur sub struktur pertama:

$$Y = P_{YX}X + \epsilon_1$$

Persamaan jalur sub struktur kedua:

$$Z = P_{ZX}X + P_{ZY}Y + \epsilon_2$$

Keterangan:

X = standar akuntansi pemerintah

Y = kualitas laporan keuangan

Z = akuntabilitas kinerja

$P_{XY}$  : Koefisien jalur Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

$P_{XZ}$  : Koefisien jalur Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja

$P_{YZ}$  : Koefisien jalur Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja

$\epsilon$  : Pengaruh faktor lain

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan prosentase total tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah pada SKPD di pemerintah kota baik. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah cukup baik (Purwaniati Nugraheni dan Imam Subaweh:2008). Kualitas laporan keuangan pada SKPD di pemerintah kota sangat baik. Dan akuntabilitas kinerja pada SKPD di pemerintah kota adalah baik.

Berikut hasil output pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan adalah:

Tabel 2.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig. Zero-order	Correlations			Collinearity Statistics	
	Std. Error	Beta				Partial	Part	Tolerance	VIF	
(Constant)	7,504	4,671		1,607	,113					
X	,620	,069	,749	8,976	,000	,749	,749	,749	1,000	1,000

Dependent Variable: Y

Tabel 3

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,749 <sup>a</sup>	,561	,554	4,052	2,241

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

$$P_{XY} = 0,749$$

$$\varepsilon_1 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0,561^2} = 0,828$$

Persamaannya adalah :

$$Y = P_{XY} + \varepsilon_1$$

$$Y = 0,749 + 0,828 \varepsilon_1$$

Dari tabel 2 terlihat bahwa nilai t 8,976 sedang t tabel dengan df = 63 dan tingkat kepercayaan 95% adalah ±1,998. Atau t hitung > t tabel, sehingga hipotesis 1 yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan diterima.

Berikut output pengaruh standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja:

Tabel 4.

Model	B	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig. Zero-order	Correlations			Collinearity Statistics	
		Std. Error	Beta				Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	3,428	2,727		1,257	,213					
	X	,117	,060	,218	1,957	,055	,695	,241	,145	,439	2,279
	Y	,411	,072	,637	5,703	,000	,800	,587	,422	,439	2,279

a. Dependent Variable: Z

Dari nilai signifikansi variabel standar akuntansi pemerintah (X) 0,055 > 0,05, atau standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja secara parsial atau hipotesis 2 ditolak, maka variabel X dikeluarkan dari sub struktur kedua.

Berikut hasil output setelah variabel standar akuntansi pemerintah dikeluarkan dari persamaan sub struktur kedua:

Tabel 5 .

Model	B	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig. Zero-order	Correlations			Collinearity Statistics	
		Std. Error	Beta				Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	6,081	2,419		2,513	,015					
	Y	,517	,049	,800	10,588	,000	,800	,800	,800	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Z

Tabel 6

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
	1	,800 <sup>a</sup>	,640	,635

a. Predictors: (Constant), Y

b. Dependent Variable: Z

Persamaan sub struktur yang baru  $Z = P_{YZ} Y + \varepsilon_2$

$$P_{YZ} = 0,800$$

$$\varepsilon_2 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0,640^2} = 0,768$$

Persamaannya adalah :

$$Y = P_{YZ} + \varepsilon_2$$

$$Y = 0,800 + 0,768 \varepsilon_2$$

Dari tabel 5 terlihat bahwa nilai signifikansi kualitas laporan keuangan (Y) 0,00 < 0,05 sehingga hipotesis 2 yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja diterima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Kontribusi standar akuntansi pemerintah (X) yang secara langsung mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Y) =  $0,749^2 = 56,1\%$ , sedang sebesar 43,9% dipengaruhi oleh variabel lain. Yaitu diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana serta transparansi. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan dipemerintahan pusat dan daerah. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan instansi pemerintah yang baik.

Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas. Kontribusi kualitas laporan keuangan (Y) yang secara langsung mempengaruhi akuntabilitas kinerja (Z)

= 0,800<sup>2</sup> = 64 %, sedang 36% dipengaruhi oleh variabel lain. Dengan adanya laporan keuangan yang baik atau berkualitas akan berindikasi pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat optimal. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penerapan standar akuntansi pemerintah dan akuntabilitas kinerja pada SKPD di pemerintah kota Yogyakarta baik. Sedang Kualitas laporan keuangan pada SKPD di pemerintah kota Yogyakarta sangat baik.

Standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja secara langsung, sedang kualitas laporan keuangan secara langsung berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Standar akuntansi pemerintah secara langsung berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja melalui kualitas laporan keuangan.

Terbentuk struktur baru dari hasil penelitian yang didukung oleh bukti empirik.

### **Saran**

Sampel yang digunakan adalah hanya dalam satu pemerintah daerah. Penelitian berikutnya dapat menggunakan beberapa pemerintah daerah dalam satu propinsi, atau menggunakan pemerintah daerah untuk beberapa propinsi. Data diambil dengan kuisioner.

Penelitian berikutnya data masih menggunakan kuisioner tetapi dengan cara wawancara, sehingga lebih menggambarkan keadaan sebenarnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim, 2007, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Edisi 3, Salemba empat.
- Akhmad Solikin, 2006, Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: Perkembangan dan Permasalahn, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol 2, No 2.
- Ardi Kusuma Arif, 2010, Pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan, studi pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya, *jurusan akuntansi FE Universitas Siliwangi*.
- Bastian, I, 2001, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Pusat Pengembangan Akuntansi, Yogyakarta, BPFE.
- Duwi Priyatno, 2009, *Belajar Olah data dengan SPSS 19*, Penerbit Andi Yogyakarta
- Dwiyanto Agus, 2006, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Ghozali, I, 2002, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- <http://www.pekalongankab.go.id>, Penerapan akuntansi berbasis akrual harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang.
- LAN dan BPKP, 2000, *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Lembaga Akuntansi Negara.
- LAN, 1999, *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta.

- Ledvina, V.C, 1991, Accountability, Corruption and Democracy: A Clarification of Concept, *Asian Review of Public Administration* Vol III.
- Mardiasmo, 2001, Perencanaan Keuangan Publik sebagai Suatu Tuntutan dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang bersih dan berwibawa, *makalah seminar IAI-KASP*, Maret, Jakarta
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta Penerbit Andi
- Natalia Cristanti Dianne, 2010, Pengaruh akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan, survey pada biro keuangan setda pemerintahan propinsi Jawa Barat, *skripsi* FE Universitas Komputer Indonesia.
- Nordiana Deddi dan Hartianti Ayuningtyas, 2010, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, Edisi Kedua.
- Nugraheni Purwaniati, Subaweh Imam, 2008, Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, No. 1, Vol 13
- Osborne David and Ted Gabler, 1995, *Reinventing Government*, Terjemahan: Abdul Rosyid, Penerbit PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Permendagri No. 4 tahun 2008 tentang Pedoman pelaksanaan *reviu* atas laporan keuangan daerah.
- Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah basis kas menuju akrual.
- Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah basis akrual.
- Santoso Urip, 2008, Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencegah *fraud*, *Jurnal Administrasi Bisnis* , Vol 4, No. 1: hal 14-33, FISIP Unpar.
- Sari Diana, 2012, Pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah, *Proceedings*, SNAB, Bandung.
- Sumiyati, 2012, Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintahan daerah (SAPD), akuntabilitas keuangan, ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (AKIP), SKPD Kabupaten Siak, *universitas Riau*.
- UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. 15 tahun 2004 tentang Peemriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah